

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan tahunan yang dibuat perusahaan menggambarkan kinerja manajemen dan dalam mengelola sumber daya perusahaannya. Informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan ini digunakan oleh pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Dengan hal tersebut, maka laporan keuangan harus memenuhi tujuannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum (PABU) agar dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat bermanfaat bagi setiap penggunanya. Dalam hal pertanggungjawaban dan kemanfaatan, dalam laporan keuangan, perusahaan harus memperlihatkan kebenaran, kelengkapan serta ketepatan waktu dalam membuat laporan keuangan tersebut. Pemegang saham mempunyai hak untuk mengetahui informasi tentang laporan tahunan secara benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu pihak perusahaan (manajemen) wajib mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu, dan transparan.

Berkembangnya isu *corporate governance* mendorong adanya peningkatan perhatian dalam tingkat pengungkapan dari aspek *corporate governance* suatu perusahaan, baik investor maupun pemerintah yang dalam hal ini melalui penyusunan peraturan atau penyusunan standar *corporate governance*. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi para pemegang saham (*stakeholders*) yang berkaitan dengan peristiwa pengungkapan tersebut dan dapat hal yang paling

pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance (GCG)* merupakan sebuah konsep yang menerapkan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi tentang laporan keuangan secara benar, akurat, serta tepat waktu. Selain itu menunjukkan kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara benar, akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja keuangan. Oleh karena itu, baik perusahaan yang sudah *go public* maupun yang belum, harus memandang GCG tidak hanya sebagai hiasan saja, melainkan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja dan peningkatan kinerja serta nilai perusahaan (Tjager dalam Darmawati, 2004).

Disclosure memberikan implikasi bahwa keterbukaan atau transparansi merupakan basis kepercayaan publik terhadap manajemen di dalam sistem korporasi. Dengan kata lain, kualitas mekanisme *corporate governance* seharusnya dapat dilihat dari tingkat keterbukaan atau transparansi (Lins dan Warnock dalam Hapsoro, 2007). Menurut Diamond, dkk dalam Hapsoro, (2007) *disclosure* akan mengurangi asimetri informasi antara investor berinformasi dengan investor tidak berinformasi. Sebagai akibatnya, perusahaan-perusahaan yang mempunyai tingkat *disclosure* yang tinggi, investornya secara relatif lebih memiliki keyakinan bahwa setiap transaksi saham yang terjadi adalah pada suatu tingkat harga yang wajar (*fair price*), sehingga meningkatkan likuiditas saham yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu studi tersebut juga memberikan argumen bahwa perluasan *disclosure* dan likuiditas saham akan berasosiasi dengan kepemilikan institusi.

wajib (*mandatory disclosure*) maupun pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) telah banyak dilakukan di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini, pengungkapan dan transparansi dalam laporan keuangan menjadi isu yang penting di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini, pengungkapan dan transparansi dalam laporan keuangan menjadi isu yang penting di Indonesia. *Forum For Corporate Governance* (FCGI, 2006) mempublikasikan sebuah survei yang dilakukan oleh *Price Waterhouse Coopers* pada tahun 1999 terhadap investor internasional di Asia, yang menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu peringkat terburuk dalam standar audit dan kepatuhan, akuntabilitas kepada pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi.

Kasus skandal korupsi dan penipuan akuntansi dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan terkemuka seperti Enron Corporation (US), Barings Empire (UK), WorldCom, dan Permalat (Italia), berakar dari kurangnya sistem tata kelola perusahaan yang baik (Muhamad *et al.*, 2009). Di dalam negeri sendiri terdapat contoh kasus akibat kurangnya sistem tata kelola perusahaan yang tepat, seperti *insider trading* saham PT Bank Central Asia, Tbk serta *overstated* laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk. (Rini, 2010). Hal ini menandakan adanya skandal korupsi dan penipuan akuntansi dan menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja dalam perusahaan tersebut. Selain itu hal ini membawa dampak yang besar bagi para pemegang saham, dampak yang paling utama adalah munculnya keraguan

Iskandar dan Chamlou dalam Hidayah ,(2008) menyatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan negara lainnya bukan hanya akibat dari faktor ekonomi makro, tetapi juga karena lemahnya *good corporate governance* yang ada pada negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi, dan pemeriksaan keuangan (*auditing*) yang belum mapan, pasar modal yang masih *non-regulated*, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas. Adanya kasus pelanggaran yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini oleh beberapa perusahaan manufaktur baik domestik maupun internasional menjadi salah satu bukti bahwa transparansi dan pengungkapan masih sangat tidak diindahkan oleh perusahaan manufaktur yang beroperasi baik domestik maupun internasional, dan manipulasi yang terjadi menjadi bukti akurat lemahnya penerapan *corporate governance* dalam suatu intitusi atau perusahaan. Berbagai respon akibat isu *Corporate Governance* mengemuka dari berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia.

Di Indonesia, respon terhadap perkembangan isu mengenai *good corporate governance* dapat ditandai dari respon pemerintah yang membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) pada tahun 1999, yang kemudian berubah nama menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada November 2004 berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No: KEP49/M.EKON/11/2004. KNKG merupakan lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan *good governance* di Indonesia secara komprehensif dan memberikan masukan kepada pemerintah

Seyogyanya menurut Lins and Warnock dalam Hapsoro,(2007) secara umum mekanisme yang dapat mengendalikan perilaku manajemen atau sering disebut mekanisme *corporate governance* yang dapat diklasifikasi ke dalam dua kelompok. Pertama, mekanisme internal spesifik perusahaan (*firm-specific internal mechanisms*), yang terdiri atas struktur kepemilikan perusahaan (*firm's ownership structure*) dan struktur pengelolaan atau pengendalian perusahaan (*firm's control structure*). Kedua, mekanisme eksternal spesifik negara (*country-specific external mechanisms*), yang terdiri atas aturan hukum (*the rule of law*) dan pasar pengendalian korporat (*the market for corporate control*).

Keberadaan mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat mengendalikan perilaku manajemen agar di dalam pengelolaan kegiatan korporasi dapat dilakukan secara terbuka, sehingga pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengkaji berbagai keputusan dan dasar pengambilan keputusan yang diambil manajemen serta menilai keefektifan keputusan yang diambil oleh manajemen. Oleh karena itu, baik tidaknya *corporate governance* seharusnya dapat dilihat dari dimensi keterbukaan (transparansi), sebagaimana dikemukakan oleh Cadbury dalam Bhuiyan dan Biswas, (2007) bahwa prinsip dasar di dalam pengelolaan suatu korporasi adalah terjadinya *disclosure*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hormati dkk (2011) yang menggunakan ukuran dewan komisaris sebagai variabel independen menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari komisaris utama

komisaris independen. Sesuai dengan *Corporate Governance Guidelines* (2007), dewan komisaris harus memiliki jadwal pertemuan tetap dan dapat dilakukan pertemuan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Menurut Ettredge *et al.* (2010), dewan komisaris yang lebih sering mengadakan pertemuan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib.

Independensi Komite audit merupakan bagian integral dari *corporate governance* yang dibebani dengan tanggung jawab pelaporan keuangan serta efektivitas sistem pengendalian internal (Owalabi dan Dada, 2011). Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi CG menunjukkan hasil yang beragam. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Wong (2001) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit lebih cenderung memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang lebih tinggi.

Kusumawati (2007) menemukan bahwa besaran atau ukuran perusahaanlah yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap pengungkapan luas *corporate governance*. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai peranan yang penting dalam pengungkapan luas dan berperan penting dalam akuntabilitas perusahaan karena semakin besar perusahaan maka akan lebih banyak informasi dan sebagai wujud dalam upaya akuntabilitas publik.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit. Penelitian yang dilakukan menggunakan profitabilitas sebagai variabel independen. Penelitian yang dilakukan Aljifri dan Hussainey dalam Pramono (2011) hasil menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan

besar cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak informasi untuk keberlangsungan usaha perusahaan.

Kepemilikan dispersi merupakan kepemilikan saham tersebar yang dimiliki oleh investor individu yaitu masyarakat. Investor individu meliputi investor di luar manajemen, selain pemerintah, institusi, dan kalangan keluarga (Alsaeed dalam Rini, 2010) . Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2006) bahwa kepemilikan dispersi berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate governance*.

Berkembangnya praktik penerapan *corporate governance* dan semakin ketatnya aturan atau regulasi pengungkapan *corporate governance* di Indonesia, serta berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis mencoba meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2012. Penulis menetapkan perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian karena perusahaan manufaktur mendominasi perusahaan – perusahaan yang tergolong dalam LQ-45 yang diperdagangkan dalam Bursa Efek Indonesia, sehingga para investor menaruh perhatian lebih terhadap perusahaan manufaktur.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rianto dan Surya (2013) yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance* Dalam Laporan Tahunan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 - 2011 ”. Dalam penelitian

Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 sampai dengan 2011. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2012. Peneliti juga menambahkan variabel independen yaitu independensi komite audit.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena pengungkapan terhadap *corporate governance* dianggap penting sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen (*agent*) kepada pemilik (*principal*). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka judul skripsi ini adalah **“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 – 2012.”**

B. Batasan Masalah

Faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan dan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu : ukuran dewan komisaris, independensi komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan dispersi. Luas pengungkapan *corporate governance* dalam penelitian ini berdasarkan klasifikasi item pengungkapan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance* ?
2. Apakah Independensi komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance* ?
3. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance* ?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance* ?
5. Apakah kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance* ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah:

1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.
2. Independensi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

4. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.
5. Kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi dari berbagai bidang yang berkaitan:

1. Praktis

- a. Menumbuhkan kesadaran bagi perusahaan mengenai pentingnya penerapan dan pengungkapan *corporate governance*.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi calon investor dalam mengambil keputusan investasi dengan informasi pengungkapan *corporate governance*.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi calon kreditur dalam mengambil keputusan pemberian kredit pada perusahaan.

2. Teoritis

- a. Menambah studi literatur tentang kualitas pengungkapan *corporate governance* dan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Memberikan bukti empiris mengenai mekanisme *corporate governance* dan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan